

# **LAPORAN KINERJA**

**PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
TRIWULAN III  
TAHUN 2020**

**STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN BELAWAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## Kata Pengantar

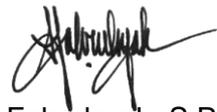
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III Tahun 2020 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Triwulan III Tahun 2020 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2020 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 15 Oktober 2020

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fahrulsyah, S.Pi, M.Si  
NIP. 19780901 200212 1 002

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan telah diintegrasikan dengan *Balanced Scorecard* (BSC). Penyusunan Lkj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 3 (tiga) perspektif dalam BSC, yaitu: *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sebagai implikasi penerapan BSC dalam upaya perencanaan Tahun 2020, Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 8 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: <sup>(1)</sup>Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis; <sup>(2)</sup>Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan; <sup>(3)</sup> Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan; <sup>(4)</sup> Terselenggaranya Pemantauan SDKP; <sup>(5)</sup> Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan

SDKP;<sup>(6)</sup>Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP;<sup>(7)</sup> Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dan <sup>(8)</sup> Tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2020, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 28 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan . Jumlah IKU ini mengalami revisi pada Triwulan III dari yang sebelumnya 30 IKU pada Triwulan I menjadi 28 IKU pada Triwulan III. Pencapaian IKU Triwulan III Tahun 2020, dari 28 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 11 (sebelas) IKU berstatus Putih (tidak ada skor), 1 IKU berwarna kuning, IKU berwarna merah tidak ada, serta 16 (enam belas) IKU berwarna hijau ( terealisasi 100%).

Realisasi anggaran tahun 2020 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 30 September 2020 sebesar **45,26%** atau sebesar **Rp 25.060.469.869,-** (*Dua Puluh Lima Milyar Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah* ) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu **Rp. 45.777.424.000,-** (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Anggaran Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III mengalami revisi anggaran dari **Rp. 76.652.522.000,-** (*Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*) menjadi **Rp. 45.777.424.000,-** (*Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Revisi anggaran ini di lakukan karena adanya pandemi Covid – 19 yang di alami Indonesia bahkan dunia sehingga anggaran tersebut di alihkan untuk penanganan virus Covid – 19 tersebut. Melalui Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2020.

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Data Umum Organisasi .....	2
D. Isu Aktual.....	5
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB III PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024.....	6
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 .....	6
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	9
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020 .....	13
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020 .....	13
B. Analisis Pencapaian Kinerja .....	16
1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat.....	16
2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan.....	17
3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.....	23
4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Perikanan.....	34
5. Sasaran Kegiatan 5: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP .....	36
6. Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP.....	39

7. Sasaran Kegiatan 7 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan.....	44
8. Sasaran Kegiatan 8 : Tata kelola pemerintahan yang baik.....	46
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	53
LAMPIRAN .....	55

## Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020.....	10
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020 .....	13
Tabel 3. Hasil Pengukuran Sub IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	18
Tabel 4. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan .....	30
Tabel 5. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat.....	31
Tabel 6. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat...32	
Tabel 7. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat .....	33
Tabel 8. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat.....	33
Tabel 9. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan SDKP TW I Tahun 2020 .34	
Tabel 10. Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP” .....	37
Tabel 11. Lokasi dan ukuran serta kondisi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi. ....	38
Tabel 12. Lokasi dan ukuran serta kondisi speed boat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.....	39
Tabel 13. Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP” .....	39
Tabel 14. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas.....	40
Tabel 15. kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas ..	41
Tabel 16. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	42
Tabel 17. Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”.....	45
Tabel 18. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Maret 2020 .....	52

## Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan.....	4
Gambar 2. Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020....	10
Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas.....	35
Gambar 4. Capaian IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan .....	48
Gambar 5. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan .....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2020 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan - kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "*good governance*".

### B. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

## **2. Tujuan :**

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

## **c. Data Umum Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

### a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

### b) Kepala Urusan Tata Usaha:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

### c) Kepala Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

### d) Kepala Subseksi Sarana dan Prasarana Pengawasan:

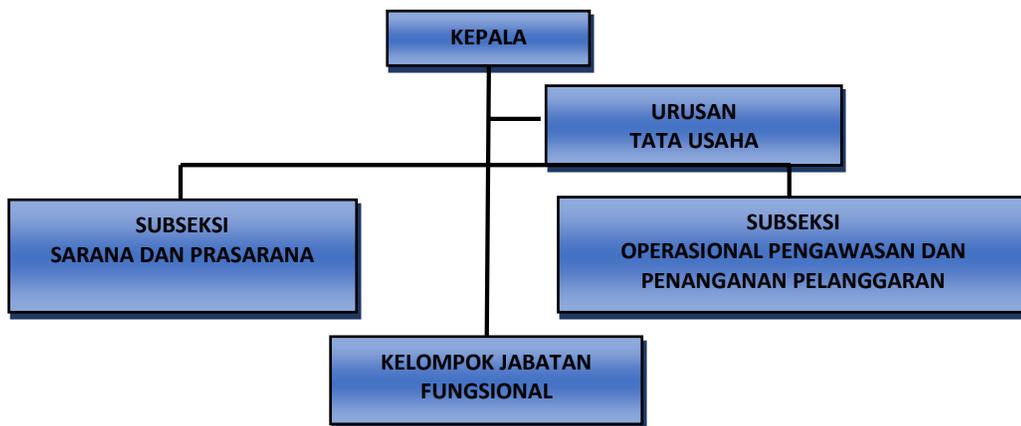
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

**e) Kelompok Jabatan Fungsional:**

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

**f) Satuan Pengawasan SDKP:**

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan meliputi 3 (Tiga) Satuan Pengawasan (Satwas) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

## D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Masih dijumpai kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau Alat Tangkap Terlarang seperti penggunaan Trawl;
2. Masih terjadi konflik antar nelayan berhubungan dengan alat tangkap dan daerah penangkapan;
3. Terjadinya degradasi lingkungan pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun) akibat aktivitas manusia (*anthropogenic activities*).
4. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
5. Kurangnya armada speedboat untuk patroli disebabkan pada tahun 2019, 1 Unit Speedboat Dolphin 005 telah di lelang.
6. Masih ditemukan kapal kapal perikanan ukuran > 30 GT yang terpantau / terdapat indikasi pelanggaran menangkap ikan di luar daerah penangkapan ikan;
7. Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan (oleh industry unit pengolahan ikan).

## E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

### **Bab III Perjanjian Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020.

### **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: <sup>(1)</sup>Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020; <sup>(2)</sup> Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan <sup>(3)</sup> Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020.

### **A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024**

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024, yaitu:

- A. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
- B. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
- C. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
- D. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- E. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

### **B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
  - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
  - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
  - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
  - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
  - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)

- b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
  - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
  - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
- a. Operasi bersama pengawasan di laut
  - b. Pertukaran data
  - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
  - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
- a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
  - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
  - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
  - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
  - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
  - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
  - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
  - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”

- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

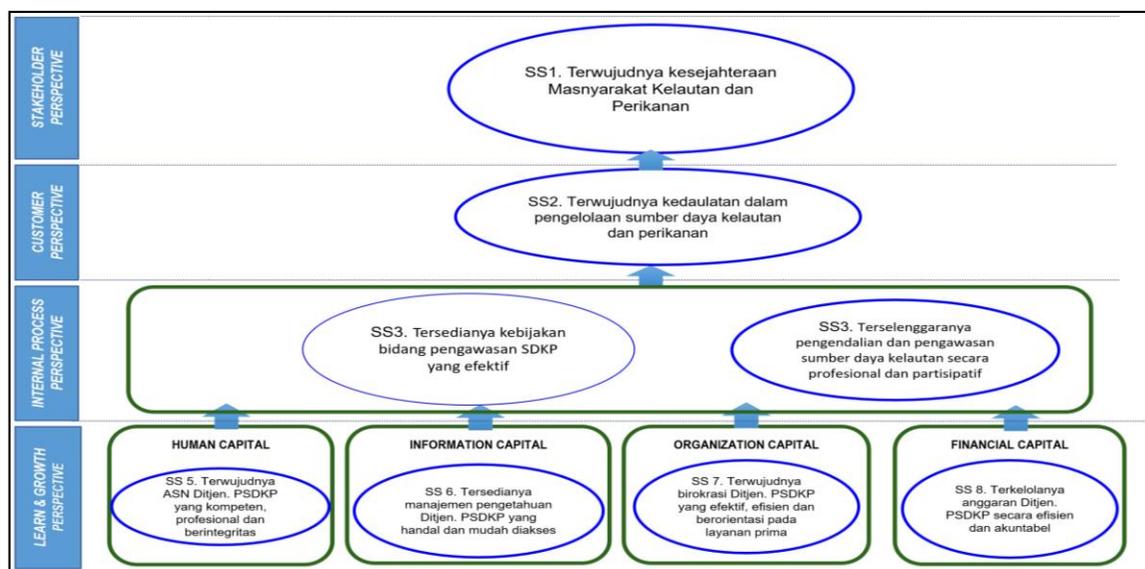
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: <sup>(1)</sup> Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; <sup>(2)</sup> Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; <sup>(3)</sup> Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, <sup>(4)</sup> sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Belawan menggunakan 4 (empat) perspektif dalam BSC, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective*. Dalam penggunaannya, Stasiun PSDKP Belawan hanya menggunakan 3 (tiga) perspektif BSC yaitu *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learn and Growth Perspective* sedangkan untuk *Stakeholders Perspective* dikarenakan Stasiun PSDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai unit kerja utama.

Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2020 dipetakan dalam Peta Sasaran Strategis pada gambar 2 berikut:



**Gambar 2.** Peta Sasaran Strategis Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020

*Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholders*. *Customers Perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan. Pada Triwulan III Tahun 2020 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan telah mengalami revisi, dimana hal ini dilakukan karena adanya pandemi virus Covid – 19 yang melanda dunia sehingga sebagian anggaran untuk kegiatan pengawasan di alihkan untuk penanganan virus Covid - 19 tersebut.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16

	sumber daya kelautan		
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,60
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,028
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2
		8. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180
		10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	40
		11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	49
		13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup	82

		Stasiun PSDKP Belawan [%]	
		19. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		20. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		21. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		22. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		23. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1
		24. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		25. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		26. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80
		27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]
		28. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1

#### D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis informasi teknologi (dapat diakses di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2020

#### 1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2020

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2020 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Strategis (SS) dengan 28 (Dua Puluh Delapan) IKU. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2020 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET TW III	REALISASI TW III	PERSENTASI
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70	0	0	0
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16	10	18	120%
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,6	0,45	0,46	102,22%
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed	0,028	0,02	0,02	100%

		Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	70	70	100%
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	0	0	0
		8. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2	2	2	100%
		9. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1	1	1	100%
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180	40	42	105%
		11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	80	10	20	120%
		12. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90	12	12,5	104,17%
		13. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	49	21	16	76,19%
		14. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22	0	0	0
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	15. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100%
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk	93	93	93	100%

		lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)				
		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93	93	100%
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	18. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72	0	0	0
		19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82	0	0	0
		20. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		21. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		22. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	0	0	0
		23. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80	0	0	0
		24. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]	0	0	0
		25. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1	0	0	0
		26. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%
		27. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP	100	100	100	100%

		Belawan [%]				
		28. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100	100	100	100%

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >=100)
2		Hati-hati (80 <=Skor<100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

## B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama periode Triwulan III Tahun 2020 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.

Capaian IKU <sup>(1)</sup> “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target yang ditetapkan sebesar 70 %. Pada TW III Tahun 2020 IKU tersebut belum memiliki capaian, target capaian akan terealisasi pada akhir tahun yaitu 70 %.

Capaian IKU TW III pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW III pada tahun 2019, karena pada tahun 2019 IKU ini tidak ada. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Adapun dukungan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan tanggal 30 September 2020 adalah Rp 0,- (*Belum ada realisasi anggaran*) dengan persentase (0 %) dari anggaran yang dialokasikan 12.600.000,- (*Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

## **2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan**

Pencapaian Sasaran Strategis “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan” diidentifikasi ke dalam IKU yaitu: **“Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 5 (lima) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: <sup>(1)</sup> Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; <sup>(2)</sup> Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; <sup>(3)</sup> Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; <sup>(4)</sup> Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; <sup>(5)</sup> Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pada TW III di targetkan pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya sebanyak 10 pelaku usaha. Karena adanya pandemi virus Covid -19, Stasiun PSDKP Belawan mencoba melakukan pengawasan dengan menerapkan protokol kesehatan dan capaian pada TW III melebihi dari yang ditargetkan yaitu tercapai sebanyak 18 unit pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 120%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Pencapaian IKU pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya pada TW III tahun 2020 lebih sedikit bila di bandingkan pada capaian TW III tahun 2019, karena pada TW III tahun 2019 Pelaku usaha yang di periksa sebanyak 12 sementara sampai dengan TW III tahun 2020 pelaku yang di periksa sebanyak 9 pelaku usaha. Capaian IKU <sup>(1)</sup> “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 5 (lima) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Hasil Pengukuran Sub IKU Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI SD TW III	PERSENTASE (%)
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	9	450%
2	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	0	0%
3	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	4	13	325%
4	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	1	100%
5	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	7	9	128,57%
<b>Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan</b>		<b>16</b>	<b>32</b>	<b>200%</b>

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada TW III tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan :
  - a. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
    - Pemanfaatan kawasan mangrove untuk kegiatan perikanan seperti pembukaan tambak sering kali tidak memperhatikan aspek kelestarian mangrove itu sendiri. Salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan suatu konsep pemanfaatan kawasan mangrove berbasis konservasi yang disebut dengan sistem silvofishery;

- Adapun silvofishery yang diterapkan di desa Sicanang (3°45'78" LU 98°38'42" BT) ini berjalan dengan baik dengan ditokohi oleh Bapak Syahdan dengan didukung oleh bantuan dari pemerintah daerah untuk menjadi wilayah silvofishery percontohan bagi para petambak-petambak lain untuk meningkatkan produktivitas perikanan serta menjaga hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Luasan mangrove silvofishery yang dimiliki oleh Bapak Syahdan seluas kurang lebih 5 Ha;
  - Kondisi mangrove di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Labuhan yang terletak di wilayah silvofishery Sicanang secara umum dalam kondisi baik dan terjaga karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan mangrove yang merupakan tempat beruayanya ikan untuk mendapatkan hasil perikanan yang maksimal.
- b. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Paluh Manan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
- Menurut informasi dari Kepala Desa Paluh Manan (bpk Syarifuddin) dan Pokmaswas Paluh Manan (bpk Nasrul) bahwa hutang mangrove di Desa Paluh Manan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sebelum tahun 1998 adalah sekitar 200 Ha. Namun sejak tahun 1998 mulai dibuka lahan tambak di daerah ini yang mengakibatkan hutan mangrove di daerah ini perlahan – lahan menjadi berkurang, diikuti dengan pembukaan perkebunan sawit. Pada saat ini hutan mangrove di daerah ini diperkirakan hanya sekitar 2 Ha;
  - Melihat kondisi ini para nelayan yang ada di Paluh Manan melalui Pokmaswas meminta agar lahan mangrove dikembalikan minimal di wilayah pesisir pantai.
- c. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
- Kondisi mangrove di Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan yang terletak di Ekowisata Pantai Mangrove Sei Nagalawan secara umum dalam kondisi baik dan terjaga;
  - Diperlukan pengawasan secara lebih intensif dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait, sehingga kelestarian dan keseimbangan ekosistem perairan tetap terjaga.

- d. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Desa Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
- Adapun ekowisata mangrove yang diterapkan di desa Sicanang (3°45'78" LU 98°38'42" BT) ini berjalan dengan baik dengan ditokohi oleh Bapak Rusmiono dengan didukung oleh bantuan dari Yayasan Gajah Sumatera sejak tahun 2013;
  - Kondisi mangrove di Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Labuhan yang terletak di wilayah Sicanang seluas 170 Ha, secara umum dalam kondisi baik dan terjaga karena kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan mangrove yang merupakan tempat beruayanya ikan untuk mendapatkan hasil perikanan yang maksimal. Terdapat 20 jenis mangrove di wilayah Sicanang ini dalam kondisi baik. 1.5 Ha area mangrove dijadikan sebagai ekowisata oleh masyarakat sekitar dibantu oleh LSM (YAGASU) sejak tahun 2013.
- e. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Kampung Nelayan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
- Luas ekosistem hutan mangrove Desa Lubuk Kertang adalah 1.200 ha dimana sebanyak 410 ha hutan bakau dikelola oleh Kelompok Tani Mekar dan sebanyak 96 ha dikelola oleh Kelompok Telukku Indah sedangkan sisanya sedang menunggu izin kemitraan kehutanan (KULIN KK);
  - Konsep awal pengembangan hutan mangrove lebih memfokuskan untuk menghidupkan kembali kawasan hutan bakau yang telah punah dirambah secara liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kemudian berkembang menjadi pusat rekreasi dan edukasi, serta memberikan tambahan pendapatan bagi Kelompok Tani Mekar dan juga sumber PAD bagi Pemerintah Kabupaten Langkat.
- f. **Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan Kec. Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
- Pengawas Perikanan mendapati kawasan mangrove di titik koordinat 04°4,5770' LU 098°18,2290' BT, dengan total luas sekitar 20.200 ha yang dibiarkan tumbuh liar tanpa pengelolaan yang intensif;
  - Menurut keterangan Bapak Eri, Sekitar 20.200 ha kawasan mangrove merupakan hutan alami yang telah tumbuh sejak lama di daerah tersebut;

- Ditemukan sebagian lahan di kawasan ini yang beralih fungsi untuk wilayah pemukiman, perkebunan sawit, dan usaha perikanan (tambak).
  - g. Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan di Pantai Sejarah Dusun I, Desa Perupuk, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara** dengan uraian sebagai berikut :
    - Terdapat pantai sepanjang 7.5 Km dengan lahan hutan bakau yang ditanam oleh pihak swasta, masyarakat dan kelompok untuk mencegah pantai dari abrasi ini dapat dilihat dari banyaknya tanaman mangrove muda, hal ini dilakukan untuk mengembalikan ekosistem mangrove yang rusak, karena hampir seluruh lahan merupakan tanah yang dimiliki masyarakat akibat garis pantai yang berubah akibat abrasi yang tinggi hingga mencapai daerah milik masyarakat namun masih ada tersisa sebagian lahan yang merupakan ekosistem mangrove alami;
    - Tidak ditemukan indikasi pelanggaran.
  - h. Pengawasan pengelolaan mangrove dilakukan Kepenghuluhan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau** dengan uraian sebagai berikut :
    - Luas mangrove di daerah ini sekitar 12 Ha;
    - Kawasan mangrove tetap terjaga dan tidak ditemukan adanya alih fungsi hutan mangrove.
2. Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan :
- a. Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel**
- Wisata bahari ini berhadapan langsung dengan pemandangan Pantai Cermin, dilengkapi dengan Theme Park yang dikelola dengan baik, menyediakan penginapan, ruang meeting, dan memiliki restoran;
  - Tiket masuk ke Theme Park ialah sebesar Rp 35.000 pada hari biasa dan Rp 45.000 pada hari Sabtu dan Minggu;
  - Menurut Bapak Samuel Hasibuan, selaku HRD, yang ditemui di lokasi, usaha wisata bahari Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel ini sudah memiliki izin, namun pada saat pengawasan dilakukan, izin sedang tidak ada di lokasi karena dipegang oleh pemilik yang sedang tidak ada di tempat;
  - Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel dapat dilihat bahwa wisata bahari ini memiliki fasilitas yang lengkap

dan telah dikelola dengan baik. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun indikasi dampak kerusakan lingkungan akibat usaha ini.

**b. Pantai Bali Lestari**

- Wisata Bahari ini terletak di pinggir Pantai Cermin dengan luasan sebesar kurang lebih 11 Ha. Pantai Bali Lestari berdiri pada tahun 2016 dan dikelola oleh pemilik usaha bernama Bapak Salim;
- Pantai Bali Lestari sudah memiliki dokumen perizinan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat pengawasan dilakukan, dokumen perizinan tidak dapat ditunjukkan karena dokumen dipegang oleh pemilik yang sedang tidak di tempat. Namun kemudian dokumen perizinan dikirimkan melalui *e-mail*. Adapun dokumen perizinan yang dimiliki oleh Pantai Bali Lestari ialah sebagai berikut:
  1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor: 8120110261482 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018;
  2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018; dan
  3. Izin Usaha (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018.

**c. Pantai Jono**

- Pantai ini berada di Dusun Masjid Timur, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara;
- Menurut Kabid Pariwisata Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Parawisata bahwa pengelolaan wisata bahari di Kabupaten Batubara sudah dilakukan namun belum optimal dan belum mendapat dukungan penuh dari semua pengelola daerah wisata. Saat ini sedang disiapkan rancangan Perda untuk memaksimalkan pengelolaan wisata di Kabupaten Batubara;
- Pantai ini sudah memiliki izin lokasi dan telah mendaftarkan kegiatan berusahanya dengan Nomor Induk Berusahaan (NIB) 8120201982453 pada tanggal 25 September 2018;
- Wisata Koperasi masyarakat Pantai Jono dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah lingkungan.

#### **d. Pantai Sialang Buah**

- Pantai Sialang Buah adalah sebuah obyek wisata alam berupa pantai pesisir laut yang terletak di bilangan Teluk Mengkudu Serdag Bedagai. Lokasi ini tepatnya berada di Jalan Pantai Sialang Buan Indah, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan terletak pada titik koordinat 3° 34.2820' N 99° 7.2210' E;
- Ibu Yusma Lubis mengatakan, bahwa keindahan pantai Sialang Buah ini menjadi sumber rezeki melimpah juga bagi masyarakat. Sebab masyarakat lokal bisa meningkatkan usaha ekonomi mereka di bidang kuliner masakan ikan laut;
- Wisata Bahari ini sudah memiliki data inventarisasi wisata dan memiliki fasilitas pendukung untuk para pengunjung yang cukup lengkap dan dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah lingkungan.

#### **e. Pantai Mutiara Indah – Sentang**

- Pantai Mutiara merupakan sebuah destinasi alam bahari yang berada di Jalan Pantai Sialang Buan Indah, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan terletak pada titik koordinat 3° 33.9030' N 99° 7.6980' E;
- Wisata Bahari ini sudah memiliki data inventarisasi wisata dan memiliki fasilitas pendukung untuk para pengunjung yang cukup lengkap dan dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah lingkungan.

#### **f. Pantai Romantis**

- Pantai ini berlokasi di Jl. Pantai Tengah No. 20, Dusun 3 Desa Sei Nagalawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan terletak pada titik koordinat 3° 35.4390' N 99° 5.6080' E;
- Pantai ini berada dibawah pengawasan Dinas Pariwisata langsung dan dikelola oleh Bapak Syaiful sejak tahun 2015 dengan luas lahan 40 hektar;
- Wisata Bahari ini sudah memiliki data inventarisasi wisata dan memiliki fasilitas pendukung untuk para pengunjung yang cukup lengkap dan dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah lingkungan.

#### **g. Pantai Klang**

- Pantai Klang merupakan pantai yang berada di Desa Naga Lawan kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara Utara terletak pada titik koordinat 3° 34.6930' N 99° 5.5060' E;

- Wisata Bahari ini sudah memiliki data inventarisasi wisata dan memiliki fasilitas pendukung untuk para pengunjung yang cukup lengkap dan dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah lingkungan.

#### **h. Pantai Cemara Kembar**

- Pantai Cemara Kembar yang berada di Jalan ATP No. 15, Desa Sei Nagalawan, Perbaungan, Serdang Bedagai Sumatera Utara Utara terletak pada titik koordinat  $3^{\circ} 35.8250' N 99^{\circ} 5.0690' E$ ;
- Wisata Bahari ini sudah memiliki data inventarisasi wisata dan memiliki fasilitas pendukung untuk para pengunjung yang cukup lengkap dan dapat dikategorikan sebagai wisata yang ramah lingkungan.

#### **i. Pantai Mangrove Kampung Nipah**

- Pantai Mangrove di Desa Muara Maimbai, Pantai Mangrove ini berada di Kecamatan Sei Nagalawan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terletak pada titik koordinat  $3^{\circ} 34.9810' N 99^{\circ} 5.9520' E$ ;
- Pantai ini sudah ada sejak tahun 2004 yang dikelola oleh Bapak Sutrisno dan Ibu Jumiati juga penduduk setempat;
- Hutan Mangrove di katagorikan cukup baik karena masih cukup lebat. Dengan potensi mangrove yang dimiliki Desa Sei Nagalawan, masyarakat telah mengembangkan kawasan ini menjadi tempat ekowisata dan wisata edukasi yaitu Pantai Mangrove;
- Pantai mangrove ini memberikan efek positif terhadap perkembangan kawasan wisata bahari yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan tidak ditemukan adanya pelanggaran atau indikasi kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan wisata bahari.

#### **j. Pantai Pasir Pak Koneng**

- Pantai Pasir Pak Koneng merupakan sebuah destinasi alam bahari yang berada di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau dan terletak pada titik koordinat  $1^{\circ} 38' 26,25'' N 101^{\circ} 32' 43,46'' E$ ;
- Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pantai Pasir Pak Koneng dapat dilihat bahwa wisata bahari ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan telah dikelola dengan baik. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun indikasi dampak kerusakan lingkungan akibat usaha ini.

**k. Pantai Marina**

- Pantai Marina merupakan sebuah obyek wisata alam berupa pantai pesisir laut yang berada di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau dan terletak pada titik koordinat 1° 38' 29,44" N 101° 32' 42,42" E;
- Pantai ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) , dengan status lahan milik Pemko Dumai. Luas lahan yang dimanfaatkan sekitar 5 hektar;
- Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun indikasi dampak kerusakan lingkungan akibat usaha ini.

**l. Pengawasan Pengelolaan BMKT di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara tanggal 01 Juli 2020:**

- Dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) nelayan yaitu Syamsul dan Midun;
- Nelayan di sekitar lokasi BMKT mengetahui adanya kapal tenggelam di perairan Batubara dan beberapa tahun lalu pernah ada perusahaan yang mengambil BMKT berupa karet
- Pada saat ini, tidak ditemukan kegiatan pengangkatan BMKT di sekitar lokasi baik oleh PT. FOI maupun nelayan tenggelamnya kapal.

**m. Pengawasan Pengelolaan BMKT di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 September 2020:**

- Gudang dan lokasi tempat pembongkaran BMKT tidak ditemukan adanya aktivitas dan gudang dalam keadaan kosong;
- Menurut keterangan masyarakat sekitar bahwa pernah ada perusahaan yang menggunakan gudang untuk menyimpan muatan kapal tenggelam berupa karet;
- Dari wawancara dengan penjaga gudang yakni Bapak Warsino diperoleh keterangan bahwa PT. FOI (Frankly Ocean Indonesia) sebagai pemilik izin untuk pemanfaatan BMKT yang diberikan oleh Panitia Nasional (Pannas) BMKT, tidak lagi menyewa gudang dan lokasi sekitarnya.

3. Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah sebagai berikut :

**a. Pulau Kampai**

- Pulau ini berada di Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara;

- Pemanfaatan pulau ini masih dikelola oleh masyarakat setempat yaitu untuk pertanian, perkebunan dan perikanan;
  - Lahan yang digunakan untuk pertanian seluas 3112 Ha, untuk tambak seluas 15 Ha dan keramba apung 187 unit. Untuk penangkapan ikan ada 15 unit kapal pancing dan 30 unit kapal jala;
  - Potensi wisata laut di pulau ini seluas 25 Ha.
4. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 3 Pelaku Usaha. Adapun pelaku usaha tersebut adalah:
- a. PT. Bahari Makmur Sejati**
- Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku jenis vannamei;
  - Air yang digunakan oleh PT Bahari Makmur Sejati untuk keperluan produksinya berasal dari sumur bor. Penanganan limbah di PT Bahari Makmur Sejati dilakukan dengan melakukan pengendapan terlebih dahulu, kemudian penanganan limbah lebih lanjut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu di gedung pengolahan limbah KIM. Limbah cair hasil produksi dialirkan dengan menggunakan pipa langsung ke KIM. Limbah cair ini berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja.
- b. PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries**
- Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa ikan patin, makarel, udang, kepiting, tuna, cumi-cumi, dan kerang;
  - Air yang digunakan oleh PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries untuk keperluan produksinya berasal dari air PAM. Penanganan limbah di PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries dilakukan dengan melakukan pengendapan di dalam bak berukuran 3x5x2 m<sup>3</sup>. Setelah proses pengendapan, limbah dialirkan melalui pipa yang dialirkan ke gorong-gorong khusus ke gedung pengolahan limbah KIM untuk diproses lebih lanjut. Limbah cair ini berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja. PT Medan Tropical Canning &

Frozen Industries memiliki dua saluran pembuangan, yaitu saluran pembuangan khusus produksi kaleng dan saluran pembuangan khusus produksi beku. Tiap bulannya PT Medan Tropical Canning & Frozen Industries menghasilkan kurang lebih sekitar 5.100 m<sup>3</sup> limbah cair.

**c. PT. Seafood Sumatera Perkasa**

- Perusahaan ini berada di Jl. Titi Pahlawan No. 38 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, Sumatera Utara;
- Perusahaan ini memiliki dokumen berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120002962402 yang ditetapkan tanggal 20 September 2018 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Lembaga Pengelola Dan Penyelenggara OSS ini juga mengeluarkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018 dengan bidang usaha pengolahan hasil perikanan;
- Perusahaan ini telah mempunyai dokumen AMDAL/UKL-UPL dengan No: 660/0573/BLH/III/2014 yang di tetapkan tanggal 18 Februari 2014 oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan dan telah memiliki izinlingkunganyang di keluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 18 Februari 2014;
- PT. Seafood Sumatera Perkasa mempunyai IPAL, dimana perusahaan secara mandiri membuat IPAL yang dibuat dengan mekanisme berupa penyaringan dan pengendapan.

**d. PT. Bumi Ayu Sejati**

- PT. Ayu Bumi Sejati berada di Jl. Medan-Belawan KM. 17.5, Kel. Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Kegiatan pengolahan berupa pengeringan ikan dan pembekuan ikan;
- Limbah cair akan diolah dengan sistem aerobik (fisika – kimia – biologi) pengelolaan limbah akan dilakukan bertingkat sesuai dengan volume, jenis dan sifat cemarannya. Sistem saluran drainase akan memisahkan air berdasarkan jenis dan kandungan cemarannya;
- Dalam pelaksanaan pengawasan PT. Ayu Bumi Sejati sudah memiliki IPAL yang memenuhi peraturan.

**e. PD. Anugerah Alam**

- Perusahaan ini berada di Jalan Jala IV No. 32 Lk. III, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Medan, Sumatera Utara;

- Perusahaan ini memiliki dokumen berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 8120105870891 yang ditetapkan tanggal 09 Agustus 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- D. Anugerah Alam sudah mempunyai IPAL, dokumen AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan serta telah melakukan uji kualitas hasil sampel air limbah. Adapun Nomor Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan tentang Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) yaitu nomor : 660/3552/BLH/XII/2012.

**f. CV. Na Rahmat**

- Perusahaan ini berada di jl. Ketapang Mameh, Komplek PPN Idi, Desa Keutapang Mameh, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur;
- CV. NA RAHMAT merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan yang dimiliki oleh Bapak Dek Wan dan terletak di titik koordinat 4o57'34" LU 97o46'20" BT. Komoditas yang dihasilkan yaitu berupa ikan tongkol, kembung, dan dencis. Bahan baku untuk kegiatan. UPI ini diperoleh dari hasil tangkapan kapal yang dimiliki oleh UPI ini maupun kapal penangkap ikan mitra. Hasil laut tersebut dibersihkan dan diolah dalam beku dengan kapasitas 12 ton/hari. Produk - produk hasil olahan tersebut dipasarkan ke pasar lokal, seperti Medan, Sibolga, Belawan, Tanjungbalai Asahan, dan sekitar Aceh;
- CV. NA RAHMAT belum memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan karena kegiatan yang dilakukan hanya berasal dari pencucian bahan baku (ikan) dan peralatan saja;
- Tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran.

**g. PT. Golden Cup**

- Perusahaan ini berada di berada Jl. Gabion Perikanan No.8, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Medan;
- PT Golden Cup Seafood sudah melakukan penyampaian draft dokumen DPLH Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan No. 005/PTGCS/VI/2020 kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan;
- Dilakukan pengujian sampel air daribakpenampungan dan air laut sekitar PT Golden Cup Seafood yang telah diuji di Sucofindo. Dengan menguji parameter PH di laboratorium, Total padatan tersuspensi, BOD 5 hari 20°C, COD dengan K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Total Ammoniak, Klorin bebas di Laboratorium, Minyak dan lemak, dan

Sulfida sebagai H<sub>2</sub>S. Dari analisis sampel tersebut diperoleh hasil di bawah baku mutu sehingga dapat disimpulkan bahwa air limbah dari perusahaan tersebut tidak mengganggu perairan lainnya.

**h. PT. Karya Agung**

- Perusahaan ini berada di Jl. Gabion Perikanan Nusantara No.4, Kel. Bagan Deli, Kec. Medan Belawan, Medan;
- PT. Karya Agung Lestari Jaya telah melakukan uji kelayakan lingkungan dengan hasil yang terdapat dalam dokumen UKL-UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan Nomor 660/3040 tanggal 30 Juni 2020. Unit pengolahan ikan ini belum memiliki instalasi pengolahan air limbah, dan hanya berupa bak penampungan;
- Sampel air dari bak penampungan sementara tersebut dilakukan pengujian dengan parameter PH di laboratorium, Total padatan tersuspensi, BOD 5 hari 20°C, COD dengan K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Total Ammoniak, Klorin bebas di Laboratorium, Minyak dan lemak, dan Sulfida sebagai H<sub>2</sub>S. Dari analisis sampel tersebut diperoleh hasil yang di bawah baku mutu sehingga dapat disimpulkan bahwa air limbah dari perusahaan tersebut tidak mengganggu perairan lainnya.

**i. PT. Red Ribbon Indonesia Corporation**

- Perusahaan ini berada di Jl. KL. Yos Sudarso, Km. 10,5, Kompleks Industrial Estate Medan;
- Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku jenis Vannamei dan paha kodok beku dengan kapasitas 1 ton/hari;
- Dalam pengolahan limbahnya, perusahaan ini sudah terintegrasi dengan IPAL terpadu yang ada di kawasan ini.

Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan – 2 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 196.750.000 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan sampai dengan 30 September 2020 telah terealisasi sebesar Rp.111.680.146 (*Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) atau 56,76%.

### 3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan” diidentifikasi ke dalam IKU yaitu **”Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari persentase capaian jumlah pelaku usaha bidang perikanan yang terdiri dari agresi 4 (empat) Sub IKU Pengawasan SDP yaitu: <sup>(1)</sup> Kapal perikanan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan; <sup>(2)</sup> Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; <sup>(3)</sup> Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan; <sup>(4)</sup> Usaha distribusi perikanan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan; dengan hasil capaian 100% .

Pada TW III tahun 2020 ditargetkan sebanyak 100 % pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya, capaian pada TW III tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu tercapai sebanyak 100% unit pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya atau dengan persentase capaian 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian IKU TW III pada tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW III pada tahun 2019, karena pada tahun 2019 IKU ini tidak ada. Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran agresi 4 (empat) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4.** Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET TW III	REALISASI SD TW III	%
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	TARGET TW III	REALISASI SD TW III	%
3	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100	100%
<b>Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai capaian Sub-IKU tersebut diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa kepatuhannya yang laik operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Kapal yang diperiksa kepatuhannya yang sesuai dengan IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, yang menangkap ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Berdasarkan hasil analisis selama bulan Januari sampai dengan September 2020. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 5 Berikut:

**Tabel 5.** Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	Pemeriksaan
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

- b. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambahan Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 6 Berikut:

**Tabel 6.** Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

- c. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 7 Berikut:

**Tabel 7.** Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 8 Berikut:

**Tabel 8.** Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi dan Kelayakan Teknis	0,25	Berita Acara Hasil Pengawasan di Simwaskan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana dan Prasarana	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,25	Laporan Hasil Pemeriksaan
<b>Jumlah Nilai</b>		<b>1</b>	

Untuk mencapai sasaran kegiatan – 3 ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 501.024.000 (*Lima Ratus Satu Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan sampai dengan 30 September 2020 telah terealisasi sebesar Rp.331.125.540 (*Tiga Ratus*

Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 66,09%.

#### 4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya pemantauan SDKP” diidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP. Adapun capaian dari Sasaran Kegiatan - 4 dapat dilihat pada table 9 sebagai berikut:

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI SD TW III	PERSENTASE (%)
1	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0,60	0,63	105%
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Ilegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan	0,028	0,0216	77,14%
3	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	70	70	100%

**Tabel 9.** Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan SDKP TW III Tahun 2020

**Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan - 4** Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

##### (1) IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI Yang Terawasi Dari *IUU Fishing* dan Kegiatan Yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 2,24 %. IKU tersebut merupakan

indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 dan Hiu 08 Pada periode Tahun 2020, Operasi Kapal pengawas dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi rata-rata sebanyak 84,5 hari operasi dengan dukungan Kapal pengawas sebanyak 2 Unit Kapal, yaitu KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08.

Capaian IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2019, karena IKU ini adalah IKU baru dan tidak ada pada tahun 2019. Berdasarkan hari operasi Pada Triwulan III tahun 2020 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh kapal pengawas seluas 12.081 nm<sup>2</sup> (nautica mile) atau sebesar 0,63%. Perhitungan tersebut dapat di lihat pada Gambar 3 sebagai berikut:

UPT PSDKP	No	Kapal Pengawas	Kelas	Total Hari	Jam Operasi (jam)	Kecepatan Dinas (NM/jam)	Jangkauan Elektif Radar (NM)	Cakupan Teoritis (CT) NM2	Area Operasi Utama	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan Aktual (CA) NM2	%Cakupan Aktual
Stasiun PSDKP Belawan	11	Hiu 01	D	79	750,15	15	12	135.027	571	0,20	0,20	5.401	0,28
	12	Hiu 08	D	90	927,833	15	12	167.010	571	0,20	0,20	6.680	0,35
<i>Total</i>								302.037				12.081	0,63

**Gambar 3.** Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

**(2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI Yang Terawasi Dari *IUU Fishing* dan Kegiatan Yang Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 0,26 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

IKU ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan capaian pada tahun 2019, karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Pengukuran kinerja diperoleh

dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi *Speedboat* pengawasan. Pada periode Tahun 2020, Operasi *Speedboat* pengawasan dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 23 hari operasi dengan dukungan *Speedboat* pengawasan sebanyak 1 Unit *Speedboat*. Berdasarkan hari operasi tersebut Pada Triwulan III tahun 2020 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh *Speedboat* sebesar 0,0216% dari Target TW III tahun 2020 yaitu sebesar 0,002% dengan presentase capaian 100%.

**(3) IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP**

IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP Stasiun PSDKP Belawan merupakan IKU baru dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 70 %, pada TW III tahun 2020 sudah tercapai 70%.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena IKU ini baru ada pada tahun 2020.

**5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP**

Dalam rangka pencapaian SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP” Stasiun PSDKP Belawan pada TW III ini mengalami revisi dari yang sebelumnya 4 (empat) IKU menjadi 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit); (2) Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit); (3) Jumlah *speedboat* yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit). Adapun IKU “Jumlah bangunan/pos pengawasan yang di bangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada TW III ini di hapuskan karena anggaran IKU tersebut di alihkan untuk penanganan Covid-19. Adapun Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP” dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10.** Capaian IKU pada SK-5 “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI SD TW III	PERSENTASE (%)
Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1 unit	0 unit	0
Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2 unit	2 unit	100%
Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1 unit	1 unit	100%

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-5 sebagai berikut:

**(1) IKU Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)**

Terselenggaranya pembangunan kapal pengawas yang dibangun lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan sebanyak 1 (satu) unit yang merupakan wujud keseriusan KKP khususnya DJ-PSDKP dalam memerangi ancaman *IUU Fishing*. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam Prioritas Nasional, untuk mendukung pencapaian IKU kapal pengawas yang dibangun pada TW III ini di anggarkan Biaya sebesar Rp. 18.821.112.000 (Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah). Jumlah anggaran tersebut telah mengalami revisi akibat terjadinya wabah virus Covid-19 dimana anggaran sebelumnya sebesar Rp.43.396.860.000,- (Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Pada Periode TW III tahun 2020 IKU kapal pengawas yang dibangun belum ada capaian, IKU akan tercapai 1 (unit) Unit *speedboat* pengawas yang dibangun pada TW IV Tahun 2020.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

**(2) IKU Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

IKU kapal pengawas yang siap operasi pada Stasiun PSDKP Belawan di dukung oleh 2 (dua) unit Kapal Pengawas yaitu HIU 01 dan HIU 08. Kegiatan utama IKU ini merupakan kesiapan kapal pengawas yang siap melakukan operasi pengawasan, diantaranya dengan melakukan pengecekan mesin, perawatan kapal pengawas dan serta pemeliharaan kapal pengawas. Pada Triwulan III tahun 2020 jumlah kapal Pengawas yang siap Operasi sebanyak 2 (dua) unit kapal pengawas.

Capaian IKU ini pada TW III tahun 2020 sama dengan capaian pada TW III tahun 2019. Data dukung capaian IKU ini tercantum dalam Tabel 11 berikut:

**Tabel 11.** Lokasi dan ukuran serta kondisi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.

Keterangan	Jumlah Kapal	Target Triwulan III	Capaian
<i>Jumlah Kapal Pengawas yang siap operasi</i>			
KP. Hiu 01	1	1	1
KP. Hiu 08	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>	<b>2 Unit</b>

**(3) IKU Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

IKU *speed boat pengawas* yang siap operasi pada Stasiun PSDKP Belawan di dukung oleh 1 (satu) unit *speed boat pengawas*. Kegiatan utama IKU ini merupakan kesiapan speedboat pengawas yang siap melakukan operasi pengawasan, diantaranya dengan melakukan pengecekan mesin, perawatan *speed boat pengawas* disertai pemeliharaan *speed boat pengawas*. Pada Triwulan III jumlah *Speedboat* yang siap operasi sebanyak 1 (satu) unit dan target IKU ini telah mengalami revisi dari yang sebelumnya *Speedboat* yang siap operasi sebanyak 2 (dua) unit. Revisi target ini di lakukan karena biaya untuk perbaikan Napoleon 028 belum tersedia.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020. Data dukung capaian IKU ini tercantum dalam Tabel 12 berikut:

**Tabel 12.** Lokasi dan ukuran serta kondisi *speed boat pengawas* lingkup Stasiun PSDKP Belawan yang siap operasi.

Keterangan	Jumlah Kapal	T arget Triwulan III	Capaian
<i>Jumlah speed boat pengawas yang siap operasi</i>			
Dolphin 014 ( Satwas SDKP Tanjung Balai Asahan)	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>

## 6. Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 5 (lima) IKU, yaitu: (1) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas; (2) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat*; (3) Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP” dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13.** Capaian IKU pada SK-6 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI SD TW III	PERSENTASE (%)
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180 unit	195 unit	108,33%
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	40 unit	93 unit	232,50%
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90 hari	84,5 hari	93,89%

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI SD TW III	PERSENTASE (%)
Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	49 hari	23 hari	46,94%
Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22 orang	0 orang	0%

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-6 sebagai berikut:

**1. IKU "Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas "**

Untuk mendukung tercapainya IKU "Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas" didukung oleh Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 yang siap operasi, di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 180 unit kapal perikanan yang di periksa dilaut. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada Periode TW III telah tercapai 42 unit kapal perikanan yang diperiksa dilaut , melebihi dari yang ditargetkan pada TW III sebanyak 40 Unit kapal Perikanan yang di periksa.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020. Capaian IKU jumlah kapal yang diperiksa dilaut menggunakan kapal pengawas dapat di lihat pada Tabel 14 berikut.

**Tabel 14.** kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	TARGET TW III	CAPAIAN TW III	CAPAIAN S/D TW III
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180 unit	40 unit	42 unit	195

## 2. IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat*”

Untuk mendukung tercapainya IKU “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat*” didukung oleh *speedboat* yang siap operasi sebanyak 2 (dua) unit, di tahun 2020 ditargetkan sebanyak 80 unit kapal perikanan yang di periksa dilaut. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada Periode TW III telah di periksa 20 unit kapal perikanan yang diperiksa dilaut , lebih dari yang ditargetkan pada TW III sebanyak 10 Unit kapal Perikanan yang di periksa.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020 Capaian IKU jumlah kapal yang diperiksa dilaut menggunakan kapal pengawas dapat di lihat pada Tabel 15 berikut:

**Tabel 15.** kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	TARGET TW III	CAPAIAN TW III	CAPAIAN S/D TW III
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	49 unit	10 unit	20 unit	93

## 3. IKU “Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Kegiatan operasional pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI Wilayah Barat didukung oleh 2 (dua ) unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 01 dan KP. Hiu 08. Capaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2020 di targetkan sebanyak 90 (sembilan puluh ) hari operasi. Pada TW III telah tercapai rata-rata 84,5 hari Operasi menggunakan Kapal Pengawas Hiu 01 dan Hiu 08 , melebihi dari target yang telah di tetapkan pada TW III Tahun 2020 yaitu rata-rata 77 Hari Operasi di lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Capaian IKU jumlah hari operasi rata-rata kapal pengawas pada TW III 2020 tercapai sebanyak 84,5 hari operasi, dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019 IKU ini mengalami peningkatan rata-rata sebanyak 19,5 hari operasi, karena capaian hari operasi kapal pengawas pada TW III 2019 rata-rata sebanyak 65

hari operasi. Adapun rincian capaian hari operasi rata-rata kapal pengawas pada tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 16.

**Tabel 16.** Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	TARGET TW III	CAPAIAN TW III	CAPAIAN S/D TW III
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90 Hari Operasi	12 Hari	12,5 Hari	84,5 Hari

Adapun realisasi anggaran untuk pencapaian IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Hari Operasi) sampai dengan tanggal 30 September 2020 adalah 5.259.795.663,- (*Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) dengan persentase (68,88%) dari anggaran yang dialokasikan Rp.7.747.440.000,- (*Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*). Anggaran ini telah mengalami revisi karena adanya wabah Covid-19, dimana sebagian anggaran tersebut di gunakan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Adapun anggaran untuk operasional hari operasi kapal pengawas sebelum di revisi yaitu sebesar Rp 12.355.480.000,- (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

#### 4. IKU “Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)”

Kegiatan utama IKU ini merupakan pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat Dolphin 014 dengan target hari Operasi *Speed Boat* pada tahun 2020 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Hari Operasi. Pada TW III telah dilaksanakan 16 hari Operasi menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan, lebih kecil dari target yang telah di tetapkan pada TW III Tahun 2020 yaitu 21 Hari Operasi di lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Capaian IKU jumlah hari operasi *Speedboat* pada TW III 2020 tercapai sebanyak 23 hari operasi, dibandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019 dengan menggunakan Dolphin 014, IKU ini mengalami penurunan sebanyak 11 hari operasi, karena capaian hari operasi

*Speedboat* pada TW III 2019 dengan menggunakan speedboat Dolphin 014 sebanyak 34 hari operasi.

Kegiatan utama yang dilaksanakan Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat sebagai berikut:

- Speed Boat Dolphin 014 Ukuran (8 Meter) Kelas F , Lokasi Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan capaian hari operasi pada TW III tahun 2020 yaitu sebanyak 23 hari operasi dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal ikan dilaut sebanyak 93 unit kapal.

Untuk mendukung capaian IKU “Jumlah hari operasi speedboat/RIB/rubber boat UPT Stasiun PSDKP Belawan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.244.853.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*) sampai dengan 30 September 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 76.673.550,- (*Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau 31,31%

Anggaran ini telah mengalami revisi dari sebelumnya sebesar Rp.826.620.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) menjadi Rp.244.853.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Revisi ini di lakukan untuk mengalokasikan dana dalam penanganan wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

#### **5. IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**

Awak kapal pengawas merupakan ujung tombak sebagai penegak hukum dibidang perikanan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Dalam menjalankan tugasnya guna mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP awak kapal pengawas harus selalu siap dalam segala hal baik mental, fisik untuk mengawaki 1 (satu) unit kapal pengawas di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Dilihat dari hal tersebut perlu adanya upaya untuk mewujudkan awak kapal pengawas yang sehat, terampil, professional dan siap dalam melaksanakan tugas pengawasan

sumberdaya kelautan dan perikanan, maka perlu adanya pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) secara berkala bagi setiap awak Kapal Pengawas, untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kesiapan fisik bagi awak kapal pengawas. Dengan kondisi kesehatan awak kapal pengawas yang sehat maka dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dilaut dengan baik.

Untuk mendukung IKU tersebut pada tahun 2020 telah ditargetkan oleh Direktorat Pengoperasian Operasional Armada (POA) sebanyak 22 Orang Awak kapal Pengawas Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pada TW III belum ada Awak Kapal yang melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*).

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020

Untuk mendukung capaian IKU “Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.400.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan 30 September 2020 anggaran tersebut belum ada terserap/terrealisasi.

## **7. Sasaran Kegiatan 7 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan**

Dalam rangka pencapaian SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: (1) Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan. . Adapun Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan pada Tabel 17.

**Tabel 17.** Capaian IKU pada SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	TARGET TW III	CAPAIAN
Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100%	100	100
Persentase Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	93	93
Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	93	93

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-7 sebagai berikut:

**2. IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).**

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 100%. Pada periode TW III capaian IKU ini telah terealisasi 100% dari 5 tindak pidana perikanan yang di tangani.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

**3. IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).**

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Jumlah kapal perikanan yang diperiksa Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) yaitu 93%. Pada periode TW III capaian IKU Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi 93% dari 5 tindak pidana perikanan yang di tangani pada TW III tersebut.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

#### **4. IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)**

Target yang di tetapkan pada tahun 2020 untuk IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) yaitu 93%. Pada periode TW III capaian IKU Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan terealisasi 93% dari 5 tindak pidana perikanan yang di tangani pada TW III tersebut.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

Untuk mendukung capaian SK-7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan” dialokasikan anggaran sebesar Rp.384.000.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*) sampai dengan 30 September 2020 telah terealisasi anggaran yang terserap sebesar Rp. 115.751.200,- (*Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau 30,14 %.

#### **8. Sasaran Kegiatan 8 : Tata kelola pemerintahan yang baik**

Dalam rangka pencapaian SK-8 “Tata kelola pemerintahan yang baik” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 11 (sebelas) IKU, yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup; (3) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (6) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan; (7) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (8) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019; (9) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (10) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan dan (11) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari SK-8 sebagai berikut:

**(1) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan adalah “indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 72. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) hasil *asesment* eselon IV lingkup Ditjen. PSDKP; 2) tingkat kehadiran pegawai melalui absensi *finger print*; 3) Capaian SKP; dan 4) LHKPN dan LHKASN. Pada Triwulan III Tahun 2020 capaian IKU indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan belum ada Skor dari target IKU yang ditetapkan yaitu 72, perhitungan skor dinilai pada akhir tahun 2020.

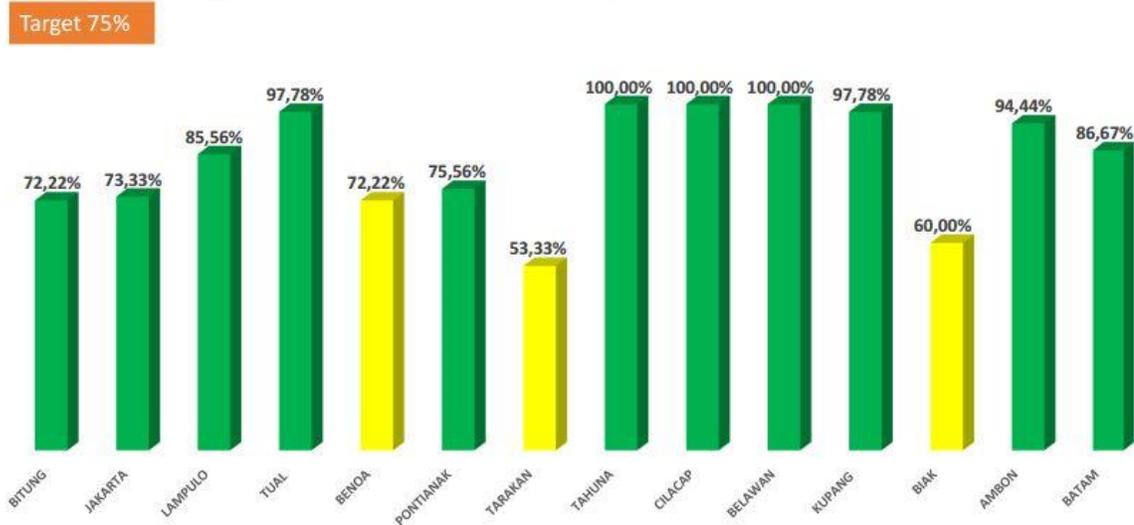
**(2) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com dengan target 82 % satu tahun. Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada Triwulan III tahun 2020 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada TW III sebesar 100 % melebihi dari target yang di tetapkan pada TW III yaitu sebesar 75%. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada TW III tahun 2019, IKU ini mengalami peningkatan sebesar 7,5%, karena Capaian Iku pada TW III 2020 tercapai sebesar 100% sementara pada TW III tahun 2019 tercapai 92,50 %. Capaian IKU unit kerja

yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada gambar 4 berikut

## Nilai Kinerja MP UPT PSDKP Triwulan III 2020



**Gambar 4.** Capaian IKU unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

### (3) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Nilai Kinerja RB lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020 belum ada capaian, Capaian IKU akan terealisasi pada TW IV dengan cara mengadopsi langsung dari Eselon I yaitu Direktorat Jenderal PSDKP yaitu 100 %.

### (4) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase pemenuhan dokumen SPIP dapat dijadikan media atau alat evaluasi sekaligus perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian intern yang diadopsi di masing-masing unit kerja. Persentase pemenuhan dokumen SPIP Stasiun PSDKP Belawan periode Triwulan III Tahun 2020 belum ada skor dan

perhitungannya akan tercapai pada akhir tahun 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP.

**(5) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Pemenuhan Dokumen AKIP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Triwulan III Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP yaitu 100 %.

**(6) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan**

Pemenuhan Dokumen Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan pada Triwulan III Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan nilai Indeks 80. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada TW III tahun 2019, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2020.

**(7) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

▪ **Nilai Kinerja Anggaran**

Pengukuran Indikator Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan meliputi 13 (dua belas) komponen capaian yaitu sebagai berikut: Pengelolaan Uang Persediaan, Data Kontrak, kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan, Rekon LPJ, renkas, Realisasi, Pagu minus dan Dispensasi SPM. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada TW III Tahun 2020 sebesar 89,43%. Target nilai IKPA yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu dengan nilai BAIK ( 88 ). Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar 5 berikut:

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	KONFIRMASI CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM			
3	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	42.66	100.00	86.00	100.00	89.00	100.00	86.44	100.00	77.27	100.00	100.00	85.00	89.43	100%	89.43
			Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	5	5			
			Nilai Akhir	5.00	2.13	5.00	12.90	8.00	4.45	5.00	12.97	12.00	7.73	5.00	5.00	4.25			
			Nilai Aspek	80.89			93.75				90.93				92.50				

**Gambar 5.** Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

**(8) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019.**

Setiap Kementerian/Lembaga baik ditingkat pusat maupun daerah, wajib mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya dengan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk meyakini keakuratan data yang disajikan dalam LK tersebut, maka secara berjenjang wajib melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama, dimana hasil rekonsiliasi ini nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tercapainya target ketaatan Tingkat kepatuhan mencapai 100%. Hal ini didukung oleh konsistensi penerapan berbagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian Triwulan III TA. 2020 terhadap persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK Stasiun PSDKP Belawan TA.2019 yaitu belum ada skor, capaian tersebut akan di nilai pada akhir tahun 2020 dengan mengadopsi langsung dari Eselon I DJ-PSDKP.

**(9) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.**

Pemenuhan Dokumen layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan presentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian TW III tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW III pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

**(10) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Pemenuhan Dokumen layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan persentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian TW III tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW III pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

**(11) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan**

Pemenuhan Dokumen layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Triwulan III Tahun 2020 belum ada capaian, capaiannya akan terealisasi pada akhir TW IV 2020 yaitu dengan persentase sebesar 100 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Capaian TW III tahun 2019 untuk IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU TW III pada tahun 2020, karena pada tahun 2019 IKU ini belum ada.

## Akuntabilitas Keuangan

Pada Triwulan III Tahun 2020 Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan mengalami revisi akibat adanya wabah Covid-19, dimana sebagian anggaran dialokasikan untuk penanganan wabah Covid-19 tersebut. Anggaran Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2020 setelah direvisi menjadi sebesar Rp 45.777.424.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dari yang sebelumnya sebesar Rp. 76.652.522.000,- (Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2020 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Triwulan III 2020 sebesar 45,26% atau sebesar Rp 20.716.954.131,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp 45.777.424.000,- (Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:

**Tabel 18.** Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – September 2020

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi armada	32.785.220.000	12.257.924.291	37,39
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	384.000.000	115.751.200	30,14
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	196.750.000	111.680.146	56,76
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	501.024.000	331.125.540	66,09
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.910.430.000	7.900.472.954	66,33
Jumlah		<b>45.777.424.000</b>	<b>20.716.954.131</b>	<b>45,26</b>

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan III Tahun 2020 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2020, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **B. Saran**

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan tahunan) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Melakukan Perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mendukung pencapaian IKU.
3. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
4. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

# LAMPIRAN

## 1. Lampiran Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346  
WEBSITE: [www.direkpa.kkp.go.id](http://www.direkpa.kkp.go.id) EMAIL: [direkpa@dkp.go.id](mailto:direkpa@dkp.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Fahrutsyah  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tb. Haeru Rahayu  
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Mei 2020

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Tb. Haeru Rahayu

Andri Fahrutsyah

*"Berjaya dengan integritas dan kualitas"*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan [pelaku usaha]	16
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,60
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,028
		6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	2
		8. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan (unit)	1
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	180
		10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	20
		11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	90
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (hari operasi)	49
		13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (orang)	22

*\*Selanjutnya dengan inisiatif dan tanggung jawab\**

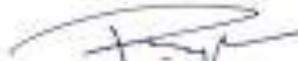
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan [Indeks]	72
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		19. Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		20. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		21. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		22. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		23. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1
		24. Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		25. Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Stasiun PSDKP Belawan [%]	100
		26. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan [Indeks]	80
		27. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Stasiun PSDKP Belawan	Baik [88]
		28. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Stasiun PSDKP Belawan dibandingkan Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Belawan TA. 2019 [%]	1

*\*berbeda dengan integritas dan transparansi\**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	32.785.220.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	384.000.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	196.750.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	501.024.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	11.910.430.000
Total Anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Belawan		45.777.424.000

Jakarta, 8 Mei 2020

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan



Andri Fehrulayyah

*"Berprestasi dengan integritas dan keteladanan"*